

PETA MASALAH SOSIAL DI BONE: POTENSI, PROBLEM DAN STRATEGI PENANGANANNYA¹

Drs. Bambang Pudjianto, M.Si²

ABSTRAK

Pemerintah daerah pada umumnya lebih mengutamakan pembangunan fisik dan ekonomi di wilayahnya daripada pembangunan kesejahteraan sosial. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang baru dimekarkan adalah masalah infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Namun kedua hal tersebut sangat terkait dengan berbagai masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, pada praktiknya jaringan sosial tidaklah begitu saja menciptakan modal fisik dan modal finansial. Dalam konteks penelitian ini banyak warga masyarakat yang memiliki pertalian-pertalian sosial yang kuat, namun sulit untuk mengakses peluang dan sumber daya melalui jaringan-jaringan yang ada (*main-stream*). Akibatnya, pertalian-pertalian sosial yang ada di tingkat lokal tidak secara langsung mampu memberikan manfaat ekonomis (tingkat kesejahteraan yang lebih baik), utamanya bagi warga masyarakat menengah-bawah. Jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif, dan alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara mendalam, pedoman FGD, dan peta wilayah. Hasil penelitian dapat diketahui, bahwa di wilayah lokasi penelitian telah memiliki potensi sumber kessos berupa; pranata pendidikan, pranata sosial, pranata kesehatan, pranata keturunan dan kekerabatan yang kuat, serta pranata jaringan kerja. Namun dengan berbagai potansi ekonomi, sosial, dan kultural yang dimilikinya; penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa jenis permasalahan sosial yang bermuara pada masalah kemiskinan. Karena itu, penting untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu agar digunakan strategi yang berprinsip pada partisipasi masyarakat dengan bersinergi pada peningkatan fungsi dan peran sumber-sumber lokal.

Kata kunci:

Pranata Sosial, Potensi dan Sumber Daya, Masalah Sosial

¹ Diangkat dari penelitian “Diagnosa Permasalahan Sosial di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan anggota Tim : Konsultan Drs. M. Rondang Siahaan; DR Bambang Rudito. Ketua Tim : Drs.Sutaat. Anggota: Dra. Endang Kironosasi, M.Si; Drs. Bambang Pudjianto, M.Si; Dra. Indah Huruswati; Drs. Suyanto. Sekretariat: Dini Khairunnisa, S.Kom

² Bambang Pudjianto, Kasub Bid. Analisis Kebutuhan Bidang Program Puslitbang Kessos dan Peneliti Muda pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI

Pendahuluan

Potret Kesejahteraan di Tengah Kelimpahan

Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone yang didirikan oleh Manurung Rimatajang pada tahun 1330, pernah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta Torisompae Matinroeri Bontoala, pertengahan abad ke-17 (Abddurazak dkk, 1989:9). Pada masa itu, masyarakat Bone yang didominasi oleh suku Bugis tersohor bukan hanya sebagai pelaut dan pedagang yang tangguh, melainkan juga petani yang ulet, handal dan produktif.³

Cermin kemasyhuran warga Bone dan suku Bugis khususnya dibidang pertanian masih terlihat sampai sekarang. Data sensus penduduk tahun 2003 menunjukkan bahwa 72,2 persen penduduk Bone berusia 15 tahun ke atas bekerja dan hidup dari sektor pertanian. Dari jumlah itu, sebesar 97,4 persen adalah warga suku Bugis. Etos kerja yang tinggi dan sistem pertanian yang baik membuat Bone di kenal sebagai lumbung padi. Bahkan bukan hanya di Sulawesi Selatan, melainkan juga di kawasan timur Indonesia.⁴

Produksi tanaman bahan makanan, terutama padi, selalu surplus. Hampir setiap kecamatan menjadi penghasil padi. Sentra penghasil padi berada di Kecamatan Kahu, Barebbo, Sibulue, Bengo, Salomekko, Tonra, Awangpone, Ajangale, Dua Boccoe, dan Cina. Tahun 2002 Bone menghasilkan 517.535 ton padi. Sedangkan tahun 2003, menurut estimasi Dinas Pertanian Kabupaten Bone, meningkat mendekati 560.000 ton. Tanah yang digarap para petani tidak hanya menghasilkan padi. Produksi jagung, ubi kayu, kacang hijau, kacang tanah dan kedelai juga berlimpah. Bahkan tahun 2002 produksi kacang tanah (13.906 ton) dan kedelai (8.760 ton) merupakan produksi tertinggi di Sulsel. Produksi 84.159 hektar perkebunan rakyat ikut memperkuat peran sektor pertanian.⁵ Hasil yang menonjol dari perkebunan adalah tebu, kakao, kelapa, jambu mete, kemiri, dan cengkeh.

³ lihat profil Bone yang dirilis dalam situs resmi Kabupaten Bone; WWW.Bone.go.id

⁴ Lihat "Kabupaten Bone dalam Angka tahun 2003" diterbitkan BPS Kabupaten Bone Tahun 2004.

⁵ Potensi Desa Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2006, atau lihat Bone dalam Angka tahun 2003/2004.

Tebu merupakan bahan baku gula Pabrik Gula Bone dan Pabrik Gula Camming di Kabupaten Bone.⁶

Pertanian telah menjadi tiang utama kegiatan ekonomi Bone. Tahun 2002 nilainya mencapai Rp 2,2 trilyun. Yang merupakan 65 persen total kegiatan daerah. Angka itu lebih kecil dibanding tahun 1999 dan 2000 yang mencapai 67,7 dan 66,3 persen. Tanaman bahan makanan menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah. Dominannya sektor pertanian di Bone juga tercermin dari luas wilayah Kabupaten Bone yang sebagian besar merupakan lahan persawahan dan tegalan. Data BPS tahun 2002 menyebutkan, dari 4.559 km persegi luas Kabupaten Bone, 88.449 ha merupakan lahan persawahan, 120.524 ha lahan tegalan/ladang, dan 43.052 ha lahan perkebunan. 'Hanya' 11.148 ha lahan untuk tambak/empang dan 145.073 ha merupakan hutan.⁷

Meskipun Bone menjadi daerah sentra penghasil bahan makanan, dalam mata rantai perdagangan hasil pertanian, para petani yang *notabene* menjadi aktor utama produksi dan merupakan mayoritas penduduk Bone justru tidak bisa menikmati keuntungan yang memadai. Segelintir spekulan dan tengkulak yang menguasai jalur perdagangan yang justru selama ini meraup untung besar. Tidak sulit untuk mendapatkan petani Bone yang terlilit hutang para tengkulak. Akibatnya taraf hidup masyarakat Bone terbilang rendah jika dibandingkan dengan potensi dan kemampuan berproduksi yang mereka miliki.

Rendahnya taraf hidup masyarakat Bone terlihat dari hasil survey yang dilakukan oleh BPS-UNDP pada tahun 2004. Survey ini menyimpulkan bahwa *Human Development Index* (HDI) warga Bone tergolong rendah. Yakni ditunjukkan dengan angka partisipasi bidang pendidikan yaitu hanya 60,7% (yang seharusnya di atas 80-90%). Partispasi jender dalam ekonomi juga masih sangat terbatas, dimana wanita bekerja yang berpendapatan hanya 28,1%. Sementara itu *life expectation* juga rendah, dibawah 65 tahun, dengan balita penderita gizi buruk yang cukup tinggi, mencapai 27%.⁸

⁶ Laporan Litbang Kompas, 22/10/2002, atau lihat juga Laporan BPS-Bappenas-UNDP tentang "The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia" tahun 2004

⁷ Ibid.

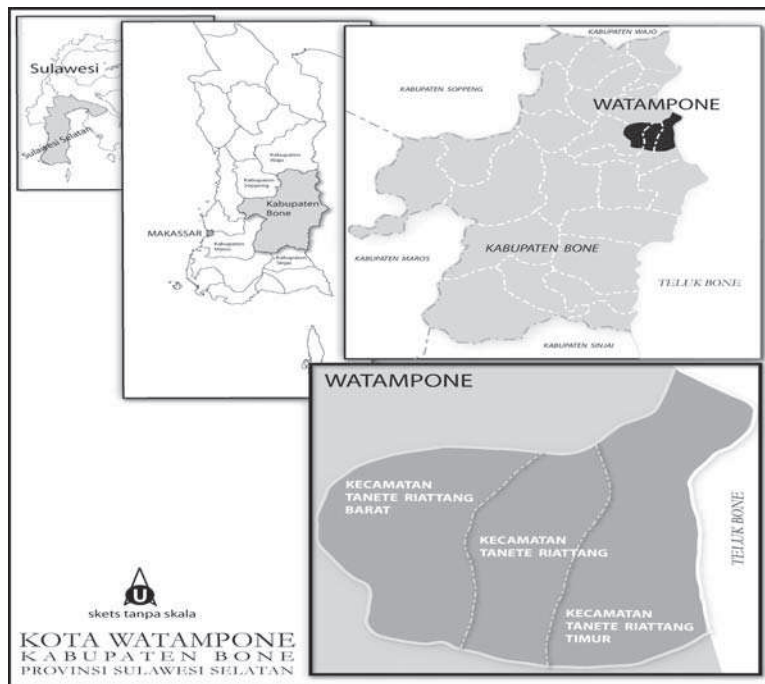
⁸ Ibid

Peta Masalah Sosial di Bone

Data-data tersebut di atas jelas sangat memprihatinkan (terlebih pada kasus bayi penderita gizi buruk), mengingat posisi Bone sebagai sentra penghasil padi di Sulsel. Lebih memprihatinkan lagi karena Bone sejak tahun 2000-an, selain unggul di sektor pertanian, kontribusi sektor perikanan juga tak kalah produktifnya. Pada tahun 1997 misalnya, sektor perikanan telah menyumbang 9,2 persen pendapatan daerah, dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 16,7 persen. Hal ini ditunjang oleh letak geografisnya, yaitu dari 27 kecamatan di kabupaten Bone, 10 di antaranya memiliki garis pantai sepanjang 127 kilometer. Ini jelas potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Namun sebaliknya, jika tidak dimanage secara benar, kasus pada sektor pertanian tidak mustahil berulang pada sektor perikanan dan sektor perekonomian lainnya, yaitu sebuah *potret buram (kemiskinan) di tengah kelimpahan*. Karena itu, jangan terkaget jika tanpa upaya dan strategi yang tepat dalam mengatasinya, maka meletusnya berbagai permasalahan sosial hanya tinggal menunggu waktu saja.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat gejala yang muncul akibat fakta sosial yang dijelaskan di atas. Artinya, bagaimanakah gambaran tentang potensi dan sumberdaya sosial, ekonomi dan alam di Kabupaten Bone memberi solusi atas permasalahan penyandang masalah sosial yang timbul akibat timpangnya strategi pembangunan dengan penguatan sumber daya lokal selama ini.

Gambar 1 : Peta Kota Watampone, Kabupaten Bone



Kerangka Fikir

Kelemahan mendasar dari pembenahan struktur perekonomian kita di tengah masa krisis (baik regional dan nasional) dinilai oleh banyak kalangan adalah karena diabaikannya variabel kondisi sosial-ekonomi sebagai bagian dari penyebab krisis. Diantaranya untuk konteks penelitian ini terlihat pada masalah ketimpangan pembangunan SDM khususnya masyarakat lapisan paling bawah.⁹ Artinya, bertambahnya keluarga miskin yang diikuti kemudian dengan meningkatnya kuantitas dan kompleksitas permasalahan sosial besar kemungkinan adalah akibat dari ketidakselarasan antara strategi pembangunan kesejahteraan dengan strategi pembangunan ekonomi dalam

⁹ Ketimpangan pembangunan masa Orde Baru terjadi dalam bentuk-bentuk: (1) ketimpangan antar golongan ekonomi masyarakat; (2) ketimpangan antara kelompok pengusaha besar-kecil; (3) ketimpangan antar wilayah; (4) ketimpangan antar subwilayah di daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi; (5) ketimpangan laju ekonomi antar sektor; (6) ketimpangan antara ekonomi perkotaan dan pedesaan; dan (7) ketimpangan pembangunan diri manusia Indonesia di lapisan masyarakat bawah. Lihat Adrinof A. Chaniago, 2001:309.

praktik. Dengan bahasa lain, bahwasanya masalah kemiskinan dan rawan sosial-ekonomi adalah karena lemahnya ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat (modal sosial) golongan menengah-bawah dalam menghadapi guncangan besar arus krisis (Adrinof A.Chaniago, 2001:316).

Untuk ukuran tertentu, program-program intervensi¹⁰ dari pemerintah terhadap masyarakat kelas bawah diakui menunjukkan kemajuan dalam beberapa indikator keberhasilan di bidang kesejahteraan, misalnya dengan penjelasan angka pendapatan perkapita penduduk yang terus mengalami kenaikan, menurunnya jumlah angka orang buta huruf, angka kematian bayi semakin dapat ditekan, dan usia tingkat harapan hidup semakin panjang. Akan tetapi tingkat kesejahteraan tersebut di sisi lain tidak serta merta dapat menjamin kemampuan dan kualitas hidup mereka secara lebih baik. Pasalnya ketika arus krisis mendera pelbagai wilayah di Indonesia (1998- sekarang), hampir semua golongan lapisan bawah dipastikan tidak mampu “bertahan” di masa krisis tersebut, tidak terkecuali masyarakat di wilayah kajian ini. Akibatnya pengangguran semakin bertambah cepat, jumlah keluarga fakir miskin meningkat, menurunnya kadar asupan gizi dan tingkat kesehatan (cacat), rebaknya anak jalanan dan terlantar, ancaman eksploitasi seksual komersial, perdagangan obat-obatan terlarang, dan seterusnya

Terpaan krisis ekonomi dan dilanjutkan dengan perubahan orientasi sosial-politik pembangunan nasional melalui bergulirnya masa transisi yang disebut “era reformasi” tak pelak juga telah memunculkan kembali apresiasi masyarakat lokal yang (tak lain adalah kelompok masyarakat lapisan menengah-bawah) terbagi-bagi dalam wilayah kesukubangsaan berusaha menciptakan akses terhadap sumber daya yang ada di wilayah kesukubangsannya. Bahkan komuniti-komuniti yang pada awalnya telah atau hampir “terkubur” di era Orde Baru, mereka berusaha sekuat tenaga membangun kembali sisa-sisa warisan kejayaan masa lalu dari sukubangsanya demi untuk turut bagian dalam sistem pencaharian ekonomi di era ini (Rudito, 2005:23).

¹⁰ Fungsi intervensi sosial, yaitu: (1) prevensi ditujukan untuk mencegah timbul dan meluasnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan masyarakat; (2) rehabilitasi, ditujukan untuk memfungsikan kembali dan memantapkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat; (3) pengembangan, ditujukan untuk pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui pengembangan potensi dirinya. Lihat Bambang Rudito dkk, 2005: 36.

Karena itu kini hendaknya pendekatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan perlu memperhatikan secara serius variabel pelapisan masyarakat baik secara sosial-ekonomi dan antar wilayah, memperkecil ketimpangan ekonomi antar sektor, serta terus mengupayakan perbaikan kualitas SDM lapisan menengah-bawah. Jika tidak, kita akan mengulang kembali kesalahan model pembangunan masa lalu yang pada akhirnya akan melahirkan tipe-tipe ketimpangan ekonomi, sosial dan politik “versi terbaru”. Salah satu kekhawatiran yang mengancam adalah kegagalan mengangkat kualitas hidup penduduk yang mayoritas bekerja di sektor tradisional (seperti pertanian dan peternakan). Yakni menjadikan sumber ekonomi sektor tradisional sebagai kekuatan potensial yang dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan sosial mereka secara proporsional.

Berhadapan dengan kondisi faktual tersebut, maka sepatutnya dicarikan alternatif langkah-langkah dan strategi penanganan yang tidak sepenuhnya menggantungkan pada anggaran pemerintah. Misalnya dengan melakukan *participatory budgeting forum* sebagaimana diamanatkan dalam SE Mendagri No. 050/987 Tahun 2003 yang menawarkan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif (Rakorbang Partisipatif). Praktikanya, surat edaran menteri ini masih semata bersifat “himbauan” yang jarang (sulit) implementasinya dilakukan di lapangan secara tuntas. Padahal dengan penganggaran keuangan daerah secara partisipatif memungkinkan penanganan pelbagai masalah sosial dan pembangunan daerah dapat lebih terarah, obyektif dan lebih berdaya-guna maksimal bagi kebutuhan riil warga masyarakatnya. Namun, lagi-lagi pendekatan seperti ini terbentur oleh masalah internal pemerintah desa, kecamatan atau kabupaten yang umumnya para staf pemerintah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengelola aset desa/kecamatan dan dana pendapatan desa/kecamatan dengan baik. Oleh karenanya, kecenderungan untuk menolak transparansi dan partisipasi sangat besar, sekalipun desa tidak memiliki aset yang cukup untuk melakukan pembangunan.

Dalam lintasan sejarahnya, suku-bangsa di Bone terkenal gigih dalam menjaga wilayah teritorialnya, atau dalam bahasa lain sumber daya perekonomian di wilayahnya. Karena itu penting memper-timbangkan konteks representasi identitas, golongan, sistem kehidupan lokal, serta pemerataan pembangunan di setiap kewilayahan.

Potensi dan Masalah Tanete Riattang : Sebuah Analisa Sosial

Di bandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Bone, kecamatan Tanete Riattang memiliki keistimewaan tersendiri. Secara geografis, posisi kecamatan yang tepat berada di tengah Kabupaten Bone memberikan keuntungan berupa infrastruktur pemerintahan dan layanan publik yang relatif lebih baik jika dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Posisi geografis Tanete Riattang yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan juga membuat kecamatan ini menjadi tujuan bagi warga Bone di wilayah pinggiran untuk mengadu peruntungan. Akibatnya, secara demografis, Tanete Riattang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi.

Secara historis-kultural, Tanete Riattang juga menempati posisi istimewa di Bone, karena pusat Kerajaan Bone pada masa silam terletak di kecamatan ini. Tidak mengherankan jika di kecamatan ini pula terdapat cagar budaya berupa makan raja-raja bone, berbagai peninggalan dan artefak budaya Kerajaan Bone dan sebuah museum penting yang menyimpan warisan budaya kebesaran Kerajaan Bone dahulu kala. Tak berlebihan kiranya, jika kecamatan ini disebut sebagai ‘pewaris sah’ kebudayaan Kerajaan Bone pada abad pertengahan.

Posisi geografis yang strategis dan warisan kultural yang kaya membuat Tanete Riattang menyimpan potensi ekonomi yang cukup besar untuk didayagunakan menjadi keunggulan wilayah. Kelurahan Manurungge dan Watampone yang dapat dibilang sebagai ‘*epicentrum*’ Kabupaten Bone merupakan bagian sentral dari perekonomian Tanete Riattang khususnya, dan Bone umumnya. Kekayaan warisan kultural seperti rumah adat Bugis (Bola Somba) di Kelurahan Watampone, Museum Saoraja Lapawawoi Kr. Sigeri dan makam raja-raja Bone di kelurahan Bukaka juga dapat menjadi objek pariwisata potensial.¹¹

Hanya di Tanete Riattang, diversifikasi mata pencaharian penduduk terjadi dalam porsi yang relatif berimbang. Dari sejumlah kelurahan di kecamatan ini, tiga diantaranya yakni Kelurahan Pappolo, Ta’, dan Walennae sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Kelurahan-kelurahan tersebut merupakan kelurahan di wilayah pinggiran kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk relatif rendah. Dengan lahan yang subur, pertanian

¹¹ Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Bone, dalam <http://www.bone.go.id/pariwisata.php>

di tiga wilayah kelurahan ini berkembang dengan baik. Sementara itu, di tiga kelurahan yakni Watampone, Bukaka dan Manurungge, sektor pertanian bukanlah mata pencaharian utama penduduknya. Kelurahan Bukaka dan Manurungge bergerak pada perekonomian sektor industri, berbeda halnya dengan Watampone yang lebih mengandalkan sektor jasa (administrasi) dan pariwisata. Selain sektor pertanian, jasa dan industri, saat ini Kecamatan Tanete Riattang juga tengah mengembangkan sektor peternakan sebagai bagian dari keunggulan wilayah. Beberapa jenis hewan ternak yang menjadi favorit untuk dikembangkan di wilayah ini adalah antara lain ayam buras, sapi dan kambing.¹²

Dengan berbagai potensi ekonomi tersebut, Kecamatan Tanete Riattang juga menyimpan potensi-potensi sosial strategis lainnya. Sebagai wilayah yang tergolong 'perkotaan', Kecamatan Tanete Riattang memiliki berbagai pranata yang dapat digunakan sebagai modal bagi peningkatan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pranata yang telah tersedia di Tanete Riattang antara lain; pranata pendidikan¹³, pranata sosial¹⁴, pranata kesehatan¹⁵, pranata keturunan dan kekerabatan yang kuat, serta pranata hubungan dan jaringan kerja yang baik dan mapan.

Namun dengan berbagai potensi ekonomi, sosial dan cultural yang dimilikinya, Kecamatan Tanete Riattang yang tergolong wilayah 'perkotaan' juga tak lepas dari berbagai permasalahan sosial. Walaupun tidak sangat kompleks, namun berbagai persoalan yang ada tetap membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Karena penanganan yang setengah-setengah hanya akan membuat permasalahan sosial yang muncul semakin banyak dan bukan tidak mungkin menjadi semakin kompleks.

¹² Potensi Desa Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2006, atau lihat Bone dalam Angka tahun 2004/2005.

¹³ Terdapat 74 lembaga pendidikan di Tanete Riattang dengan perincian; TPA/TK 25 buah, SD/MI 34 buah, SMP/MTs 7 buah dan Perguruan Tinggi 4 buah, BPS Kabupaten Bone, 2005.

¹⁴ Terdapat 6 jenis pranata sosial, yakni; arisan keluarga (17 buah), PKK (28 buah), dasawisma (39 buah), siskamling (28 buah), karang taruna (6 buah), LPM/BPD (8 buah) dan jimpitan (11 buah), lihat BPS Kabupaten Bone, 2005.

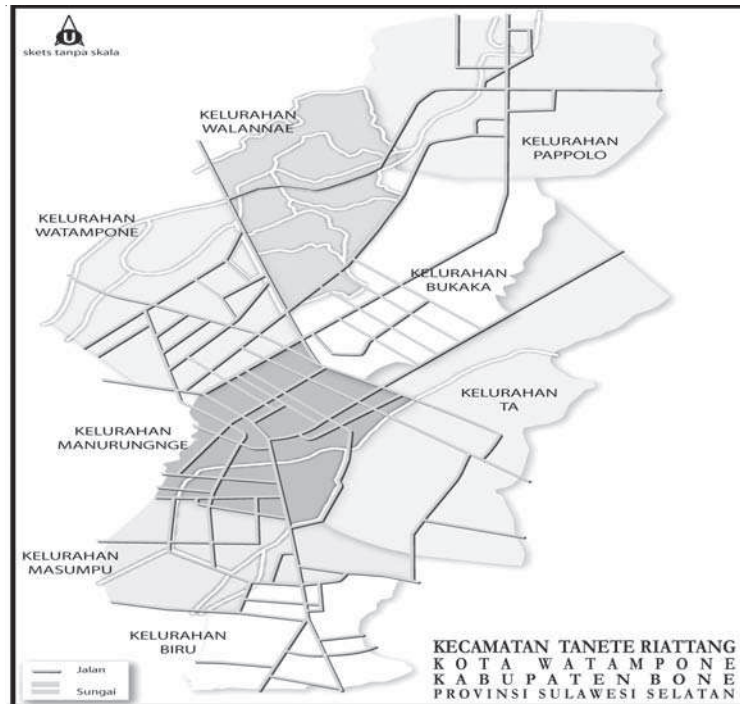
¹⁵ Terdapat 2 puskesmas dan 24 posyandu, 20 dokter, 78 perawat, 16 bidan dan 8 dukun/pengobat tradisional. Tidak terdapat rumah saki di Tanete Riattang, namun jarak dengan RS kabupaten sangat dekat, BPS Kabupaten Bone, 2005.

Peta Masalah Sosial di Bone

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat 12 jenis permasalahan sosial yang terjadi di Tanete Riattang, sejak dari masalah anak terlantar, anak nakal, anak cacat, wanita rawan sosial ekonomi, penyandang cacat, lanjut usia terlantar, cacat bekas penyakit kronis, napza, eks napi, keluarga fakir miskin, rumah tidak layak huni, sampai keluarga bermasalah psikologi. Dari sejumlah jenis permasalahan tersebut, masalah sosial yang berlatar belakang ekonomi menunjukkan gejala paling dominan. Dari 1520 kasus, terindikasi 80,1% diantaranya merupakan masalah sosial berlatar belakang ekonomi, yaitu dengan perincian 49,2% (748 kasus) masalah keluarga fakir miskin, 33,6% (512 kasus) masalah wanita rawan sosial ekonomi, dan 7,3% (111 kasus) masalah rumah tidak layak huni. Selebihnya, sebesar 19,9% terbagi relatif rata dalam 9 masalah sosial lainnya.

Berbagai jenis masalah sosial tersebut di atas merupakan bentuk ancaman secara ekonomi, sosial dan politik bagi proses pembangunan kesejahteraan sosial di Tanete Riattang. Celakanya, ancaman ini secara faktual menjadi lebih besar akibat terbatasnya anggaran belanja daerah bagi upaya penanganan dan penyelesaian pelbagai jenis PMKS tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan. Terlebih dana stimulan bantuan sosial yang diharapkan menjadi bagian dari jawaban persoalan, selama ini masih sangat tergantung pada alokasi dana dari pusat dan provinsi, membuat pemerintah daerah tidak dapat secara leluasa dan cepat menyelesaikan masalah sosial tersebut.

**Gambar 2. Peta Kecamatan Tanete Riattang,
Kabupaten Bone**



Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran/peta mengenai jenis, kriteria dan lokasi penyandang masalah sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial secara kualitatif di Kabupaten Bone. Deskriptif yang dimaksud adalah mencari dan menggali persepsi yang ada dan berkembang di masyarakat dengan menggali kenyataan sosial yang ada dan mengkaitkannya dengan budaya yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Yakni simbol-simbol penyampaian dan penetapan suatu gejala sosial sebagai kenyataan yang ada di sekeliling masyarakat dan yang dialami oleh anggota masyarakat.¹⁶

¹⁶ Lebih lanjut tentang penelitian kualitatif lihat Matthew B Miles & A. Michael Huberman, "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru" Jakarta : UI Press, 1992.

Peta Masalah Sosial di Bone

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone Kecamatan Tanete Riattang, Sulawesi Selatan. Kriteria populasi dalam penelitian ini didasarkan pada penduduk yang menetap di daerah ini, baik dilihat dari jenis kelamin, jenis pekerjaan yang ada, kriteria penduduk penyandang masalah sosial, lokasi, dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Bone.

Sumber data terbagi dalam bentuk sumber data primer, yaitu kategori perorangan atau individu, kelompok, lembaga/institusi yang berkompeten yang hidup dan berkembang di daerah tersebut. Sementara sumber data sekunder mencakup literatur, baik cetak maupun elektronik yang mendukung tujuan penelitian.

Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara mendalam (*indepth interview*), pedoman FGD dan peta wilayah. Data yang berhasil dikumpulkan diolah secara kualitatif, lalu ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dibentuk matrik pemetaan sosial yang menggambarkan permasalahan sosial dan potensi kesejahteraan. Pendekatan kualitatif yang dimaksudkan disini adalah untuk melakukan pemetaan sosial, pemetaan terhadap pranata-pranata sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan menjadikannya suatu aktivitas rutin serta berkesinambungan dilaksanakan oleh masyarakat lokal.

Penelitian ini pada dasarnya mempunyai tujuan memetakan masalah sosial yang ada dan muncul di masyarakat dan ditanggapi oleh masyarakat itu sendiri sebagai suatu masalah. Untuk mendeteksi masalah sosial diperlukan suatu pendekatan dan metodologi guna memahami dan memetakan masalah sosial yang terjadi, yaitu dengan melakukan pendekatan yang sifatnya kualitatif, karena masalah sosial adalah masalah perasaan, penilaian berdasar pada norma dan aturan yang menjadi acuan bagi komunitas yang mengalaminya.

Alternatif Strategi Penanganan Masalah Sosial di Tanete Riattang

Masalah pokok dari berbagai jenis permasalahan sosial di Tanete Riattang sebagaimana nampak dalam data di atas adalah persoalan kemiskinan. Seperti pernah diungkap banyak kajian bahwa menyelesaikan persoalan kemiskinan tergolong sebagai agenda yang berat dan rumit, meskipun bukan berarti tak teratasi. Oleh karenanya, penerapan strategi

yang jitu yang didasarkan atas bacaan yang tepat dan akurat atas data dan realita mutlak diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah kemiskinan.

Kisah sukses beberapa negara atau komunitas dalam mengentaskan kemiskinan patut untuk ditelaah sebagai pelajaran dan sumber inspirasi. Banyak analisa yang menyatakan bahwa kemiskinan dipengaruhi banyak faktor, sejak dari persoalan ketertutupan akses modal, struktur sosial dan birokrasi yang menindas, pendidikan sampai budaya. Dan karenanya, penanganan terhadap masalah ini juga membutuhkan berbagai pendekatan. Namun demikian, tanpa bermaksud melakukan simplifikasi, dalam kasus Tanete Riattang, pelajaran dari Porto Alegre di Brazil dan Grameen Bank di Banglades dalam mengentaskan kemiskinan patut untuk dijadikan inspirasi.

Strategi penanganan kemiskinan di Porto Alegre didasarkan atas dua strategi, transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran daerah. Di Porto Alegre, melalui mekanisme *local budgeting forum*, setiap warga kota mempunyai hak untuk tahu berapa dan untuk apa anggaran daerah dialokasikan. Bukan hanya itu, warga juga mempunyai hak untuk turut menentukan alokasi anggaran daerah tersebut. Hasilnya, angka kemiskinan di Porto Alegre menurun drastis karena agenda-agenda utama yang menjadi kepentingan publik seperti pengentasan kemiskinan mendapatkan prioritas utama untuk didanai. Selain itu, korupsi juga menjadi tereliminasi yang membuat tingkat kebocoran anggaran untuk rakyat menjadi kecil.¹⁷

Strategi yang diterapkan Grameen Bank (GB) lain lagi. Muhamad Yunus, sebagai pendiri GB dan juga peraih nobel perdamaian 2006, berkeyakinan kemiskinan akut yang terjadi di Banglades khususnya daerah-daerah pedesaan akan dapat diatasi jika dapat dilakukan dua hal; *pertama*, akses terhadap modal bagi rakyat miskin dipermudah. *Kedua*, kaum perempuan diberdayakan sebagai penggerak roda perekonomian mikro. Melalui GB, Yunus melakukan dua hal tersebut; memberikan pinjaman modal bagi kaum *papa* secara mudah dan tanpa agunan, dan sasaran pemberian pinjaman itu difokuskan kepada kaum perempuan. Hasilnya, lebih dari 8000 keluarga yang menjadi nasabah GB terangkat taraf

¹⁷ Lihat, Boaventura de Sousa Santos, "*Participatory Budgeting in Porto Alegre : Toward a Redistributive Democracy*" Sage Publication, 1998

perekonomiannya yang berdampak pada naiknya taraf pendidikan dan kesehatannya.¹⁸

Dua kasus tersebut, mengajarkan kita setidaknya terdapat empat strategi yang dapat digunakan dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Tanete Riattang, yakni melalui transparansi anggaran daerah, partisipasi (melibatkan masyarakat) dalam penyusunan alokasi anggaran, permudah akses modal bagi rakyat miskin, dan berdayakan perempuan sebagai *leading sector* penggerak ekonomi rumah tangga. Pertanyaannya, mungkinkah hal itu dilakukan? Menurut bacaan saya sangat mungkin!

Pertama, dengan disahkannya UU Nomor 32 Tahun 2002 memberikan peluang bagi setiap kabupaten/kota melakukan inovasi dan inisiasi dalam pembangunan wilayahnya masing-masing. Berdasarkan UU ini, daerah (kabupaten/kota) mempunyai kewenangan dan otonomi penuh untuk mengembangkan kreatifitas membangun daerahnya, diluar lima hal; pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, fiskal dan agama.

Kedua, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 050/987 Tahun 2003 yang menawarkan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif (rakorbang partisipatif) membuka peluang bagi terjadinya *participatory budgeting*. Dengan SE ini, ide untuk membuat semacam *participatory* atau *local budgeting forum* di tingkat kabupaten ataupun kecamatan mempunyai pijakan hukumnya.

Ketiga, iklim demokratisasi telah membuka kesadaran masyarakat kita akan pentingnya transparansi, efektivitas, efisiensi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Demokratisasi juga membuat organisasi-organisasi sosial masyarakat sebagai bagian dari *civil society* tumbuh subur, termasuk di Kabupaten Bone, khususnya di Tanete Riattang. Instrumen ini penting bagi pelaksanaan strategi-strategi tersebut di atas.

Keempat, faktanya dari data penyanggah masalah sosial tersebut terdahulu, perempuan merupakan kelompok masyarakat yang cukup dominan menyanggah masalah sosial. Padahal jika diberdayakan, akan menjadi roda penggerak ekonomi keluarga yang sangat efektif.

Dengan berbagai argumentasi tersebut, penerapan strategi pengentasan kemiskinan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dapat dilakukan. Oleh sebab itu, masalahnya bukan lagi seberapa mungkin strategi itu dapat

¹⁸ Lihat situs resmi Grameen Bank : www.grameen-info.org

diterapkan, melainkan seberapa kuat kemauan kepala daerah dan pihak-pihak terkait melakukannya. Sebagai catatan, strategi program/kegiatan dari pemerintah nantinya selayaknya bersinergi positif dengan pranata-pranata sosial yang ada di masyarakat. Jika nilai, identitas, kultur, pola hidup dan pranata sosial yang ada di masyarakat diabaikan, dikhawatirkan akan menimbulkan segregasi sosial, ekonomi dan etnik, atau sekurangnya tidak mendapatkan apresiasi masyarakat lokal.

Bercermin dari lingkup masalah sosial dan berbagai strategi penanganannya, perlu ditegaskan bahwa target sasaran yang perlu diperhatikan untuk program penanganan masalah sosial di Tanete Riattang adalah rumah tangga miskin, kelompok perempuan rawan sosial-ekonomi, balita dan anak cacat, serta anak nakal dan anak terlantar. Sementara potensi institusi lokal yang bisa dioptimalkan adalah kelompok tani/kelompok usaha yang diharapkan dapat bersinergi dengan KUBE, Kukesra dan Koperasi. Selanjutnya PKK, posyandu, puskesmas dan pengajian yang diharapkan mampu bersinergi dengan dokter dan tenaga medis yang ada serta para tokoh agama; serta karang taruna dan LPM yang menjembatani akses pengambilan keputusan terkait hajat hidup masyarakat di lingkungannya.

Beberapa program dapat digagas untuk menjalankan berbagai strategi penanganan masalah sosial diantaranya; Program Mitra Usaha Mandiri yang meliputi program penguatan ekonomi produktif bagi keluarga miskin, perempuan dan petani; Program Kesehatan Terpadu yang meliputi penyuluhan balita sehat, pembinaan penyandang cacat, bina anak terlantar dan tuna susila; Program Peningkatan Kualitas Layanan Panti dan Program penyediaan database PMKS melalui sejumlah penelitian dan pengkajian.

Kesimpulan

Tanete Riattang sebagai salah satu kecamatan utama di Kabupaten Bone memiliki potensi ekonomi, sosial dan budaya yang cukup strategis untuk dikembangkan. Potensi ekonomi yang perlu untuk terus dikembangkan di Tanete Riattang terutama berada pada sektor pertanian, industri dan jasa (administrasi), termasuk sektor peternakan. Untuk potensi sosial Tanete Riattang terutama pada ketersediaan berbagai pranata yang cukup lengkap yang dapat digunakan sebagai instrumen penting dalam menangani berbagai permasalahan sosial. Selain itu, berbagai keunggulan demografis dan geografis juga menjadi modal sosial tersendiri yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan kecamatan ini ke depan. Disamping tentunya potensi budaya Tanete Riattang berupa berbagai peninggalan

budaya Kerajaan Bone yang dulu memang berlokasi di kawasan Tanete Riattang

Selain memiliki berbagai potensi unggulan, Tanete Riattang tidak lepas dari sejumlah permasalahan sosial yang patut untuk segera ditangani. Dari sejumlah masalah tersebut (12 jenis PMKS), maka masalah kemiskinan menjadi problem utama dan mendesak yang harus segera ditangani bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Ditilik dari diterminan kemiskinan, disamping disebabkan oleh kebijakan internal yang tidak kondusif bagi penguatan perekonomian lokal, tampaknya tergesernya fungsi dan rapuhnya peran jaringan pranata sosial-ekonomi semakin memperburuk ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Dengan demikian sebenarnya penguatan ketahanan sosial ekonomi tidak cukup dengan menemukan apa saja modal sosial yang ada, tetapi lebih luas lagi bagaimana menggalang kekuatan untuk mengembangkan jaringan lokal (desa) guna lebih berdaya dan tetap kokoh di tengah derasnya terpaan perubahan global.

Karena itu penting untuk menangani berbagai masalah tersebut utamanya masalah kemiskinan, agar digunakan strategi yang berprinsip pada transparansi, partisipasi, mempermudah akses modal bagi rakyat miskin dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan fungsi dan peran sumber-sumber kesejahteraan sosial lokal melalui;

1. Peningkatan kualitas SDM para penggiat pranata sosial dan ekonomi melalui pelatihan para pengurus perkumpulan sosial-ekonomi, organisasi sosial berbasis okupasi (mata pencaharian pokok di tingkat lokal) yang umumnya cukup eksis di wilayah ini, serta organisasi sosial berbasis jender yang meskipun kegiatannya mengalami pergeseran (PKK dan Posyandu) tetapi perannya masih cukup efektif bagi peningkatan kualitas hidup utamanya warga miskin.
2. Mempermudah akses modal bagi rakyat miskin dan perempuan melalui bantuan stimulan yang digulirkan secara proporsional dan merata. Serta menekan rebaknya spekulasi dan para tengkulak (rentenir) yang memainkan “nilai hasil produksi” para petani/usaha kecil lokal.
3. Membentuk kelompok jaringan atau forum bersama antar kelompok sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan seterusnya sebagai wadah edukasi, tukar informasi, termasuk menjadi embrio bagi terbentuknya semacam *local budgeting forum*.

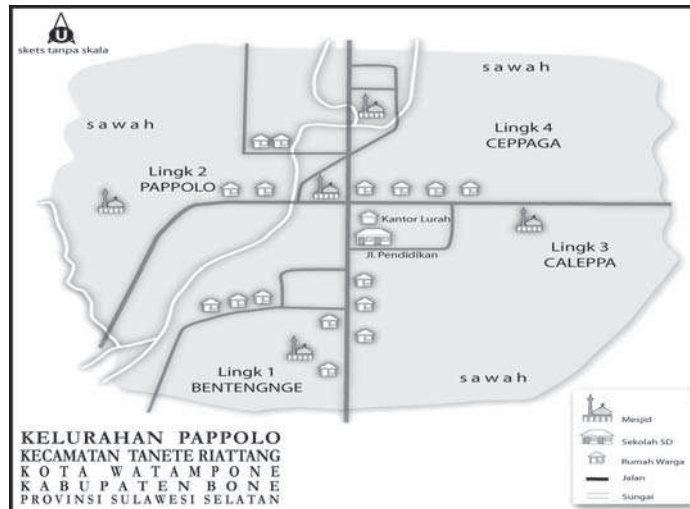
4. Pengawasan secara berkesinambungan baik dari pemerintah daerah, provinsi dan pusat, maupun kalangan masyarakat untuk menjamin terlaksananya program sesuai dengan maksud dan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

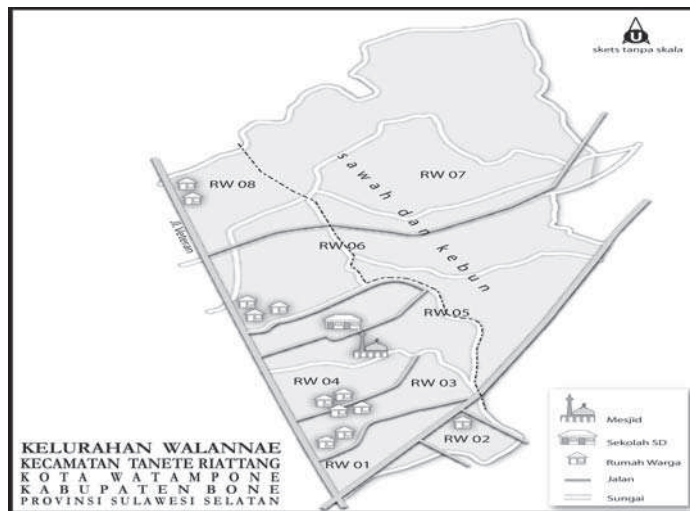
- Adrinof A. Chaniago, 2001, "Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia", Jakarta: LP3ES.
- BPS (*Statistic Indonesia*)-Bappenas-UNDP, 2004, tentang *The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia*.
- Christiaan Grootaert, Deepa Narayan, Veronica Nyhan Jones, dan Michael Woolcock, "Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire," The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, November, 2003, dalam <http://www.mapl.com.au/A13.htm>.
- Deepa Narayan and Michael F. Cassidy, "A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory," *Current Sociology*, March 2001, Vol. 49(2). Lihat <http://www.mapl.com.au/A13.htm>.
- Ian Winter, "Towards a theorized understanding of family life and social capital," Australian Institute of Family Studies, Working Paper No. 21, April 2000, dalam <http://www.mapl.com.au/A13.htm>.
- Kabupaten Bone Dalam Angka, 2005, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone.
- Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Bone, dalam <http://www.bone.go.id/pariwisata.php>
- Rudito, Bambang dkk., 2005, "Peta Permasalahan Sosial di Kabupaten Sebatik", Litbang Depsos RI.
- Tim Crescent IPB, 2003, Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial, 2003, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran

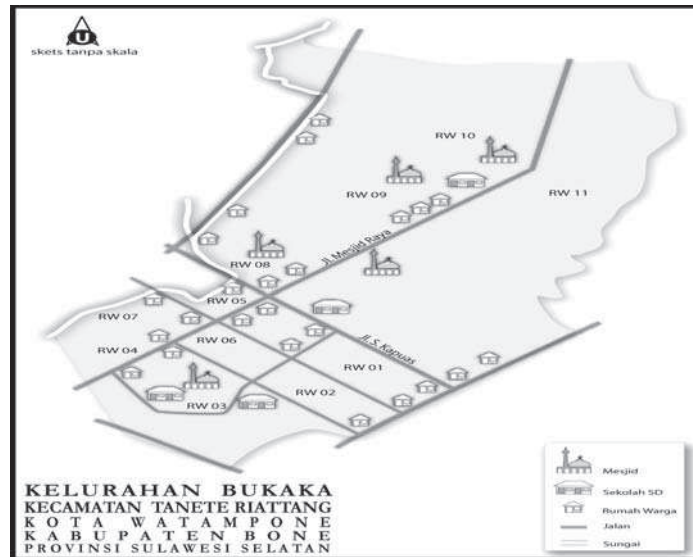
Gambar 3. Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang



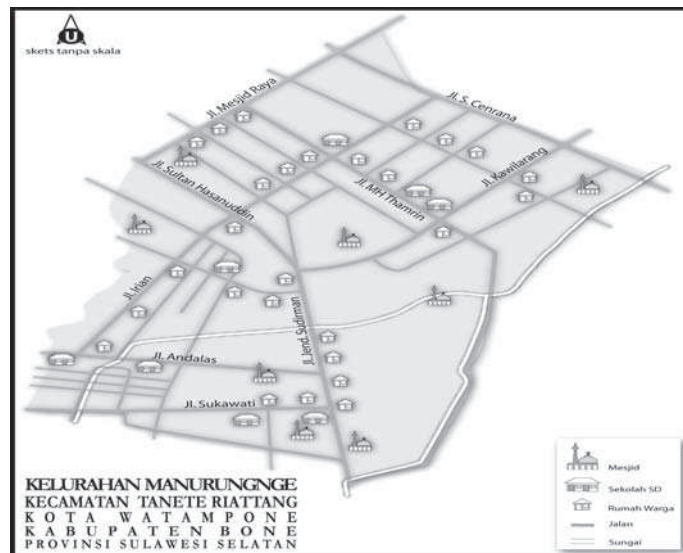
Gambar 4. Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang



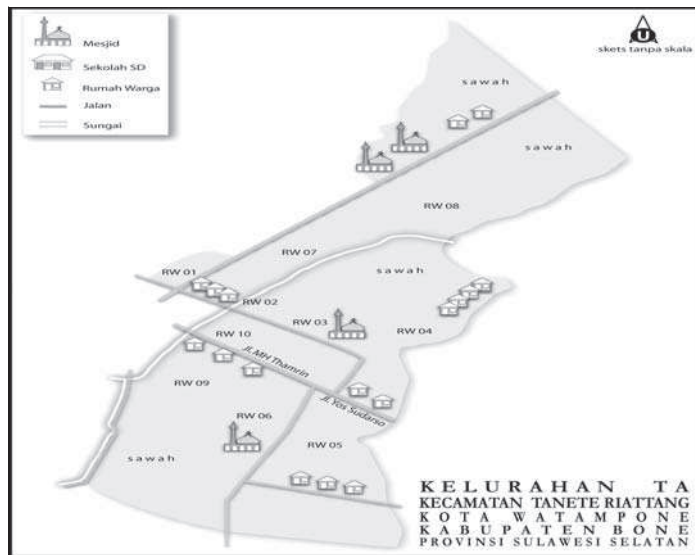
Gambar 5. Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang



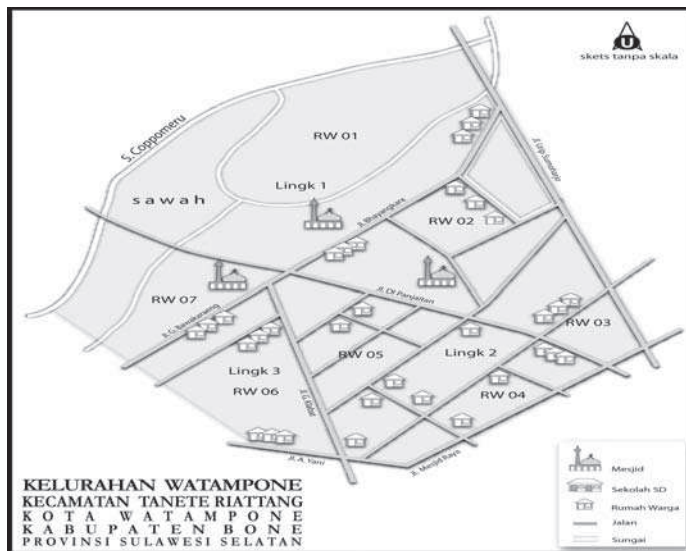
Gambar 6. Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang



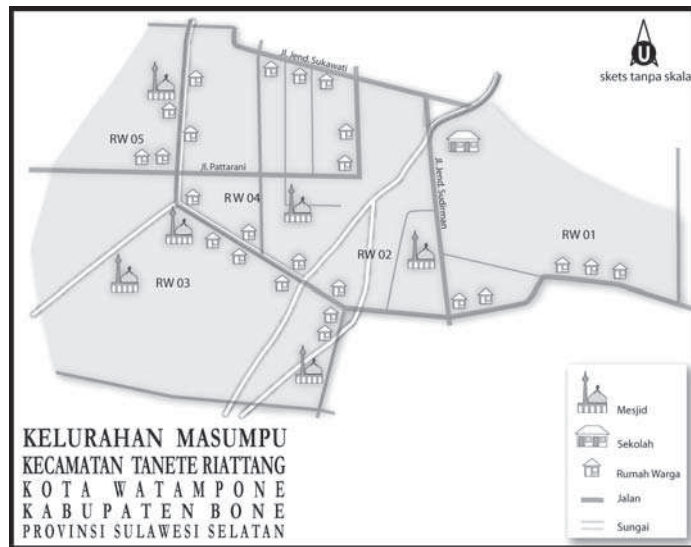
Gambar 7. Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang



Gambar 8. Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang



Gambar 9. Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang



Gambar 10. Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang

